

==Weekly Tax Updates==

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Berikut adalah fokus utama dan arah penguatan ekosistem keuangan nasional

Penguatan Kelembagaan & Tata Kelola

- OJK (Otoritas Jasa Keuangan): Memperkuat kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan, termasuk penanganan inovasi teknologi sektor keuangan dan perlindungan konsumen dari kejahatan siber.
- Bank Indonesia (BI): Menyesuaikan tata kelola dan akuntabilitas anggaran, serta memperkuat tujuan bauran kebijakan agar lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor riil.
- LPS (Lembaga Penjamin Simpanan): Penguatan fungsi penjaminan dan restrukturisasi untuk menjaga stabilitas sistem perbankan.

Ekosistem Digital & Komoditas Baru

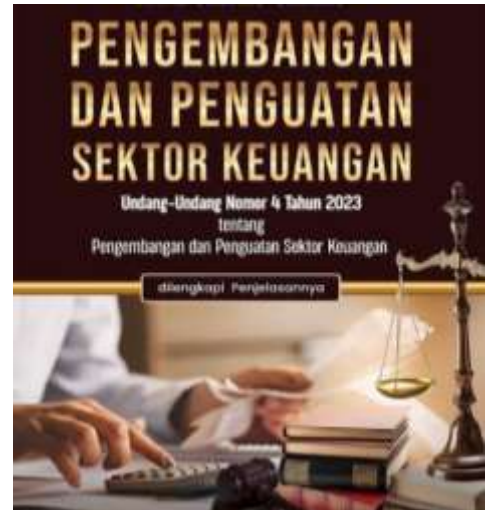
- Aset Kripto: Industri dan transaksi aset digital diatur secara ketat di bawah pengawasan OJK dan Bappebti untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan investor, khususnya generasi Z.
- Bursa Baru: Pembentukan bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Penegakan Hukum & Satgas Anti-Penipuan

- Pemberantasan Kejahatan Finansial: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian/lembaga untuk mencegah dan menindak pinjaman online (pinjol) ilegal dan aktivitas perjudian online.

Pusat Finansial & Pasar Modal

- Pusat Finansial Internasional: Membuka kawasan khusus (*financial center*) di Indonesia yang didukung dengan insentif pajak khusus untuk menarik minat investor mancanegara dan domestik.
- Demutualisasi BEI: Restrukturisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk meningkatkan tata kelola dan kepercayaan pasar.
- Surat Utang Danantara: Penguatan penerbitan instrumen investasi (*bon merah putih*) untuk menarik dan mengelola dana dari luar negeri.



DJP Berhasil Kumpulkan Rp 23,5 Triliun dari Perluasan Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan sebesar Rp 23,5 triliun dari upaya perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu penopang pengamanan penerimaan negara sekaligus modal penting untuk mencapai target penerimaan pajak pada tahun-tahun mendatang. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memerinci, penerimaan dari perluasan basis pajak tersebut berasal dari berbagai sumber. Mulai dari penambahan wajib pajak baru sebesar Rp 912,9 miliar, sebesar Rp 1,96 triliun dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) baru, serta wajib pajak yang sebelumnya dormant atau nonaktif sebesar Rp 20,63 triliun.





Pajak Google CS Masih Jadi PR, DJP Siap Perkuat Aturan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui pemajakan perusahaan digital global seperti Google dan perusahaan teknologi multinasional lainnya masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Untuk itu, DJP berencana memperkuat aturan perpajakan internasional seiring implementasi Global Minimum Tax (GMT) pada 2026 hingga 2027. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penguatan hak pemajakan Indonesia terhadap perusahaan multinasional menjadi salah satu fokus utama dalam agenda reformasi perpajakan internasional. Menurutnya, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah dalam memastikan Indonesia dapat mengenakan pajak secara optimal atas aktivitas

ekonomi yang berlangsung di dalam negeri. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penguatan ketentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam *tax treaty* atau perjanjian penghindaran pajak berganda yang dimiliki Indonesia dengan berbagai negara mitra.

DJP Pasang Kuda-Kuda Hindari Shortfall Pajak pada 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya untuk mengejar target penerimaan pajak dalam APBN 2026. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya shortfall atau kekurangan penerimaan di tengah tantangan perlambatan ekonomi yang masih membayangi. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah tetap menjadi acuan utama bagi DJP, meskipun proyeksi Kemenkeu menunjukkan pertumbuhan penerimaan hingga akhir tahun berpotensi berada di bawah kebutuhan untuk mencapai target APBN. Menurut Bimo, proyeksi pertumbuhan penerimaan pajak sekitar 20,6% yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan estimasi berdasarkan rata-rata kinerja penerimaan pajak hingga Mei 2026 dan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini.



Bersiap! Pungutan Pajak Marketplace Mulai Berlaku Juli 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan implementasi kebijakan pemungutan pajak melalui marketplace mulai berlaku pada Juli 2026. Saat ini, pemerintah tengah memasuki tahap akhir persiapan dengan melibatkan pelaku industri digital agar proses transisi dapat berjalan dengan baik. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa seluruh perangkat regulasi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut pada dasarnya telah siap. Selain itu, implementasi kebijakan juga telah memperoleh dukungan dari Menteri Keuangan maupun DPR. Meski demikian, DJP masih akan melakukan diskusi bersama para pelaku industri digital sebelum kebijakan resmi diterapkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak yang terlibat.



Terlibat Kasus Pajak, DJP Sita Uang Tunai Rp2 M dari Perusahaan Ini

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat (Kanwil DJP Jakarta Pusat) menyita aset PT GR berupa uang tunai senilai Rp 2 miliar. Penyebabnya, perusahaan itu diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui perusahaan yang bergerak di bidang konsultan manajemen. Kanwil DJP Jakarta Pusat memastikan, tindakan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perpajakan.



Awasi!

Coretax Bisa Cek Kewajaran Pajak dari Tagihan Listrik Wajib Pajak

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan sistem Coretax kini mampu membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menguji kewajaran pelaporan pajak wajib pajak melalui pemanfaatan berbagai sumber data, termasuk data konsumsi listrik. Menurut Bimo, Coretax dibangun sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang telah berjalan sejak 2018 dan mulai beroperasi penuh pada 2025. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan, pengolahan data, dan manajemen kepatuhan

perpajakan dalam satu platform. Data konsumsi listrik dapat menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesesuaian antara profil ekonomi seseorang dengan pajak yang dilaporkan. Sebagai contoh, DJP dapat membandingkan besaran konsumsi listrik suatu rumah tangga dengan jumlah pajak yang dibayarkan pemiliknya.

